

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 PADA KANTOR
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Akuntansi



OLEH

REGELINDA FEBRIANTI LANANG

NIM : 2017110198

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2021

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 Ayat 2
PADA KANTOR KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG**

Regelinda Lanang¹, Risnaningsih², Sri Andika Putri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang 2021

Email : Lananglinda0@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bertanggung jawab untuk memudahkan anggota dalam bentuk pelayanan simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan PPh pasal 4 ayat 2 pada KPRI UB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan laporan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya Malang lebih mudah dipahami melalui penerapan Pasal 4 ayat 2 perpajakan. Kesimpulannya adalah Kantor Koperasi Republik Indonesia Universitas Brawijaya Malang telah menerapkan PPh Pasal 4 ayat 2 yang berdasarkan peraturan UUD dan *tax rate* yang berlaku.

Kata Kunci : Penerapan, PPh Pasal 4 Ayat 2, Koperasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan pada hakekatnya mewujudkan kontribusi publik kepada negara, sebagai bentuk kewajiban partisipasi menyediakan dana untuk pengeluaran publik yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyediaan fasilitas umum dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Fungsi Perpajakan sebagai sumber dana Pengeluaran Pemerintah. Agar perpajakan tidak menimbulkan hambatan atau hambatan, perpajakan harus memenuhi syarat yang pertama bahwa perpajakan harus adil. Peraturan perundang-undangan yang adil, termasuk perpajakan secara menyeluruh. Keadilan yang wajar dalam pelaksanaannya berarti hak sebagai berikut: menunjukan keluhan, penangguhan pelunasan, dan banding ke Dewan Penasehat. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan warga negaranya untuk menyatakan keadilan. Yang kedua Tidak mengganggu perekonomian, pengumpulan pajak dan dagang, dan tidap dapat menyebabkan perlambatan sosial ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha di tanah air, diharapkan penerimaan pajak penghasilan ini akan terus meningkat. Undang-undang yang memberi wewenang mengenakan pph atas pendapatan khusus. Pemerintah telah menyatakan aturan yang mempertimbangkan kemudahan, dan pengawasan

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah mendirikan Koperasi yang bertujuan agar dapat Membantu anggota meningkatkan pendapatan usaha mereka pada akhirnya akan membantu mengurangi kemiskinan.

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha atas dasar pengurus, dan pengawas. Koperasi memegang fungsi menjadi penggerak Perdagangan. dua fungsi itu, diharapkan dapat merespon dan menciptakan kesetimbangan dengan menerapkan prinsip bisnis. Alasan dipilihnya koperasi sebagai objek penelitian karena penelitian sebelumnya mengenai aplikasi perpajakan. koperasi adalah badan usaha yang sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan mewujudkan serta melebarkan perekonomian nasional, menakhlikkan andil berikut bersandarkan ketentuan dan demokrasi ekonomi KPRI UB Malang karena koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana KPRI UB menerapkan PPh Pasal 4 ayat 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap KPRI UB?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

membantu memahami penerapan pph pasal 4 ayat 2 di KPRI UB.

2. Secara Umum

a) Bagi KPRI UB

penelitian ini dapat memanfaatkan untuk pedoman pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan pada KPRI UB.

b) Bagi Peneliti

Pengetahuan bisa dikembangkan saat memperoleh teori dan konsep ilmiah dalam pendidikan sehingga dapat diterapkan saat praktik lapangan.

3. Secara Akademis

Peneliti berharap dapat menambah pengetahuan dan penelitian tambahan di bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, (2002). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Hati, R. K. (2016). Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen*.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mokoagow, Wita Wardani. (2015). *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu [Jurnal]*, Manado (ID), Universitas Sam Ratulangi Manado. didownload di <http://media.neliti.com>
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan : Teori dan kasus Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Disti Aulia. (2018). *Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Bagi Hasil Tabungan Di Bri Syariah Kcp Metro*. Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Lampung
- Sukardi. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RND*. Bandung : Alfabeta

Sumarsan, Thomas. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Malang : Empat Dua Media.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.

Zain, Mohammad. (2010). *Himpunan Undang – Undang Perpajakan*. PT. Indeks : Jakarta.